



**LAPORAN
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
TAHUN 2024**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maknud dan Tujuan	2
BAB II GAMBARAN UMUM	3
A. Definisi	3
B. Aase-Aase Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat	3
C. Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat	4
BAB III HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	10
A. Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan	10
B. Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan	12
C. Rekomendasi	12
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	13
A. Hambatan	13
B. Upaya Penyelesaian	13
BAB V PENUTUP	14
LAMPIRAN	

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat 10

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Satuan Pengaduan	10
Tabel III.2 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Unit Kerja	11
Tabel III.3 Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Jenis Pengaduan	11
Tabel III.4 Status Penanganan pengaduan	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merupakan upaya menujuakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan cita Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian RSUD Wonosari dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak menutup kemungkinan ada pejabat/ pegawai di lingkungan Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/ atau penyelengguran kewenangan serta adanya kebijakan Direktur RSUD Wonosari agar tercipta sistem pengawasan siang di kalangan pegawai RSUD Wonosari, RSUD Wonosari telah menetapkan Keputusan Direktur Nomor 018/KPTS/2024 tentang Pemberhentian Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di RSUD Wonosari.

B. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan:

1. Maksud penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim kepada Direktur atas pelaksanaan program kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Adapun tujuan penyusunan Laporan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Definisi

1. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi *whistle blower's system* dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengalihui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/ atau tindak kejatanan di lingkungan RSUD Wonosari.
2. Pengaduan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengalihui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran dan/ atau kejatanan di lingkungan Rumah Sakit.
3. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjalankan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Tim pengelolaan pengaduan RSUD Wonosari adalah tim yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat.
5. Bagian informasi dan pegadian adalah sistem pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh Rumah Sakit.

B. Awas-Awas Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1. Kepastian hukum yaitu mengalihmakan landasan peraturan perundang-undangan yang bertujuan dalam menangani pengaduan masyarakat;
2. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;

3. Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparat terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang benar;
 4. Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya;
 5. Akuntabilitas yaitu harus dapat diperlakukan sebagai komitmen bagi masyarakat, baik proses maupun hasilnya;
 6. Objektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, keprilangan pribadi, gelangan ataupun kepentingan pihak tertentu;
 7. Proposionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang salah lainnya secara seimbang;
 8. Keterbukaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.
- C. Etika dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat
- Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dalam berikap, bertindak, berutup, dan berperlaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuh kembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat.

1. Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah yang Menangani Laporan Pengaduan Masyarakat.
 - a. Aparatur yang menangani pengaduan masyarakat wajib mempunyai nilai-nilai dasar sebagai berikut:
 - 1) Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
 - 2) Integritas, menjujukan perilaku yang jujur dan bermarabout;
 - 3) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
 - 4) Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas pribadi.
2. Kewajiban dan Larangan Aparatur yang Menangani Laporan Pengaduan Masyarakat.
 - a. Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat wajib:
 - 1) Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
 - 2) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Menggunakan etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
 - 4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
 - 5) Mengaga informasi yang bersifat resmi terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
 - 6) Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada instansinya, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat dan berhenti dih tugas;

- 7) Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak luar yang diperoleh sebagai komitmen pelaksanaan tugas selama menangani pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti di tugas.
- b. Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dilarang:
 - 1) Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - 2) Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat;
 - 3) Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan masyarakat;
 - 4) Menyampaikan informasi, dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
 - 5) Menganggap kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
2. Etika Aparatur dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat:
 - a. Etika berhadap pelapor meliputi:
 - 1) Memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santuh, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - 2) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - 3) Menghormati kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor.

5) Memberikan penyelesaian secara proporsional terhadap perkembangan proses pengaduan masyarakat yang dianggap

b. Etika terhadap terlapor meliputi:

1) Mengunjung tinggi atas praduga tak bersalah;

2) Menghormati hak-hak terlapor.

c. Etika terhadap secara Aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat meliputi :

1) Menjalin kegasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;

2) Menggalang rasa kebersamaan;

3) Menghargai perbedaan pendapat;

4) Saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

d. Unsur-unsur Pengaduan

Pengaduan paling sedikit memperhatikan unsur 4W + 1H, yaitu:

- a. What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan;
- b. Where, dimana perbuatan dilakukan;
- c. When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
- d. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
- e. How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

e. Bentuk Pengaduan

Pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan :

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan atau
- c. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai di lingkungan Rumah Sakit.

f. Saluran Pengaduan

- a. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi email/ web dengan alamat: email: rsudwojosari08@gmail.com,
web : www.rsudwojosari.risti.id.

- b. Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas di Sekretariat Tim Pengelolaan Pengaduan dengan alamat: Jalan Taman Brakti Wonosari Gunungkidul 55951 Telepon (0274) 391007, 391288 Fax. (0274) 393437.
- c. Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditunjukkan kepada Tim Pengelolaan Pengaduan RSUD Wonosari dengan alamat: Jalan Taman Brakti Wonosari Gunungkidul 55951 Telepon (0274) 391007, 391288 Fax. (0274) 393437.
- d. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di tempat/tampat unit pelayanan di RSUD Wonosari.
- e. Pengaduan disampaikan secara lisan dari atau melalui layanan telepon/pesan singkat ke nomor : 081919883385.
- f. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui layanan faksimili ke nomor : 0274-393437.
- g. Pengaduan disampaikan melalui instagram dengan alamat : https://www.instagram.com/rsud_wonosari/?hl=id
- h. Pengaduan disampaikan melalui facebook dengan alamat : <https://www.facebook.com/rsud.wonosari.50/>

7. Tugas Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat:

- a. Mengawasakan kegiatan akuntabilitas pelayanan publik;
- b. Melakukan kegiatan klasifikasi berhadap pengaduan masyarakat;
- c. Menindak lanjut hasil pengelolaan pengaduan;
- d. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam upaya tindak lanjut pengaduan;
- e. Melakukan kegiatan perbaikan pelayanan atas dasar masukan dari masyarakat; dan/ atau
- f. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

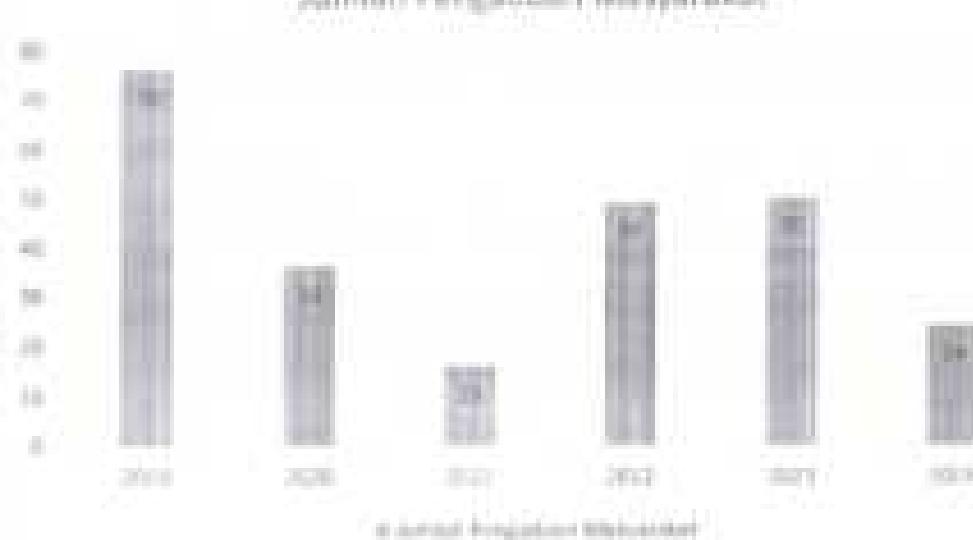
- a. Direktur melakukan pemantauan dan/ atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Rumah Sakit;
- b. Direktur melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigasi atau hasil pemeriksaan;
- c. Suatu pengaduan diwajarkan selesai jika:
 - 1) Pengadu mencabut pengaduan;
 - 2) Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi Tim/ Unit kepada Pengadu;
 - 3) Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari Tim Pengelolaan Pengaduan Rumah Sakit dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;
- d. Dalam hal pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/ atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi Tim Pengelolaan Pengaduan dengan menunjukkan/ memberi identifikasi Pengadu yang diperlukan;
- e. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pernyataan pihak Pengadu, Tim menyelenggarakan sistem pemantauan bisa sepanjang bulan, triwulan dan semester atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit di lingkungan Rumah Sakit.

BAB III
HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Saluran Pengaduan

Berdasarkan saluran pengaduan yang ada untuk kurun waktu tahun 2024 terdapat 24 pengaduan. Jika di rinci berdasarkan saluran pengaduan dan substantasi unit dapat dilihat dalam tabel berikut :

Grafik III-1
Jumlah Pengaduan Masyarakat



Tabel III-1
Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Saluran Pengaduan

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	Datang Langung	2
2	Surat	1
3	SMSWA	8
4	Instagram	3
5	Kotak Saran	9

6	E Lapor	—
7	Facebook	2
8	Email	1
Jumlah		24

Tabel III.2

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah
1	IGD	3
2	Sub Bagian Umum	2
3	Poli Kandungan	1
4	Instalasi Farmasi	4
5	Ruang Melati	3
6	Instalasi Santasi	1
7	Instalasi Laboratorium	1
8	Poli Jantung	2
9	Poli Urologi	2
10	Pendaftaran IRU	3
11	Poli Orthopedi	2
Jumlah		24

Tabel III.3

Jumlah Pengaduan Masyarakat Per Jenis Pengaduan

No	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pelanggaran disiplin	4
2	Etnik	3
3	Melakukan tindakan dalam pelaksanaan kepada masyarakat	10
4	Dugaan Fraud	—
5	Lainnya (Informasi/Saran)	2
Jumlah		24

B. Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Dari 24 pengaduan yang diterima, maka status penanganan atas pengaduan tersebut s.d. 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel III.4
Status Penanganan pengaduan

No	Status Penanganan Pengaduan	Jumlah	Persentase
1	Selesai	24	100 %
2	Proses	0	0 %
	Jumlah	24	100 %

C. Rekomendasi

Terdapat 3 rekomendasi berupa:

1. Pelanggaran disiplin yaitu diberikan sanksi kepada petugas Poli Orthopedi untuk menepati jadwal dan tepat waktu
2. Melakukan himbah dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan memberi pembinaan kepada pegawai yang melanggar disiplin yaitu pelayanan tidak tepat waktu, untuk mengatur jadwal dan kegiatan lainnya agar tidak mengganggu layanan
3. Pelanggaran etika yaitu dengan memberikan peringatan berupa teguranisan kepada yang berhiges di poli jantung,pendaftaran I.R.I dan IGD.

BAB IV

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

A. Hambatan

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan periode Tahun 2023, antara lain :

1. Masih adanya pengaduan yang diterima oleh masing-masing Unit Kerja dan hasil penanganan pengaduannya belum dilaporkan kepada Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
2. Belum optimalnya penanganan pengaduan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

B. Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang akan diaksanakan dalam rangka peningkatan pengelolaan pengaduan antara lain :

1. Melakukan integrasi data dari masing-masing unit dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit SIMRS berkaitan rencana pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan melalui Web;
2. Melakukan koordinasi secara berkala terkait validasi data yang diterima oleh masing-masing unit;
3. Direktur agar memberikan asistensi yang memadai kepada Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsiya sebagai sarana akuntabilitas sesuai arahan yang telah diambil dan menjadi saran umpan balik bagi peringkatkan kinerja dan pertukaran penyusunan pelaporan oleh Tim Pengelolaan Pengaduan yang akan datang.

Wonosari, 7 Januari 2025

Mengataku |

Direktur

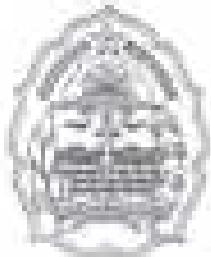


Drs. Dedi Prasetyorini, M.Sc
NIP. 197001042006042011

Ketua Tim Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat RSUD Wonosari


Sumartana SKM,MM
NIP. 19670327199031004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESKESIATAN
RSUD WONOSARI

rsudwonosari@gmail.com

Jalan Tamansari Bhakti 05 - Wonosari - Gunungkidul - 55812

Telp. (0274) 391007, 391288, Faksimile (0274) 393437

Fax: rsudwonosari@gmail.com, Laman: rsudwonosari.gunungkidul.bkn.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 04 /KPTS/2024**

TERTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI TAHUN 2024**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan meminimalisir pengeluhan dari masyarakat perlu adanya mekanisme pengelolaan pengaduan di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- b. bahwa untuk mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewajiban Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 149 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kehadiran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Berdaulat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonoasari Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Meskipun
KESATU

Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah Wonoasari Tahun 2024 dengan misi dan peran sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam dikti KESATU Keputusan ini adalah :

- a. memfasilitasi laporan eksemaabilitas pelayanan publik;
- b. melaksanai kegiatan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat;
- c. menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan;
- d. memelihara koordinasi dengan unit-unit terkait dalam upaya mendukung fungsi pengaduan;
- e. melaksanakan kegiatan perbaikan pelayanan atau dana masukan dari masyarakat; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dikti KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggungjawab kepada Direktur.

Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Wonoasari.

Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diWonoasari
pada tanggal 06 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 016 / KPTB/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WONOSARI TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ibu Heru Sulistyowati,Sp.A	Penanggungjawab	Direktur
2.	Burniawati,SKM,HMR	Ketua	Kabag. Tata Usaha
3.	Mujiyati,SHKM,MPsi	Secretaria	Kepala Sub Bagian Umum
4.	dr. Rini Owi Lestari, MSc,Sp.A	Anggota	Ketua Komite Zakat dan Hukum
5.	dr. Ajil Pranggi Anisyah, Isp. E	Anggota	Ketua Komite Media
6.	drg. Nurb Putri Widarmi,Sp.JOG	Anggota	Kepala Instansi Rawat Jalan
7.	Hermansyah,SIT,M.Kes	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
8.	Erryawati, S.SIT, MAP	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan
9.	drg. Wahyu Hidayat Indra Purwana	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan Medis
10.	Zainal Arifin, S-ST	Anggota	Ketua Komite Kepenawatan
11.	Drs. Henry Sudarmawati, Agt	Anggota	Ketua Nakes Lainnya
12.	Metyl Pertamawati, S.M	Anggota	Kepala Unit PIPAK
13.	Hurliana Martin Istian	Anggota	Staf Sub Bag Umum
14.	dr. Anti Christiana Wilawati	Anggota	Kepala Instansi Rawat Inap
15.	Bucipta, S.Si,T.Ners ,MAP	Anggota	Kepala Ruang IGD



DIREKTUR RSUD WONOSARI

HRS DR. H. BULISTYOWATI



RSUD WONOSARI

PENYELESAIAN PENGADUANATAU KONSENTRASI MASYARAKAT

No. Dokumen
01/1606/10/VII/2022

No. Revisi
003

Halaman
1/2

Tanggal Terbit

SPO

6 Juli 2022



Dr. HERGULISUDYOWATI, Sp.A.
NP : 19700206 199903 2 004

PENJELTIAAN

Penyelatan pengaduan atau konflik masyarakat terhadap keluhan atau konflik yang disampaikan oleh masyarakat umum terhadap kebijakan, prosedur dan keputusan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan

- Memberikan pertahanan terhadap masyarakat untuk guna memberikan penyelesaian terhadap keluhan yang disampaikan
- Sebagai pelumas untuk menyelenggarakan misi lab perangkat atau kafilah di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

KELIKAHAN

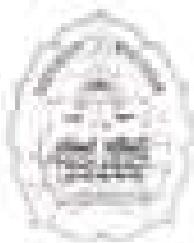
Peraturan Direktor RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari

PROSEDUR

A. Pengaduan Secara Langsung

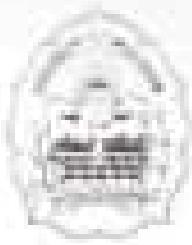
- Masyarakat umum menyampaikan pengaduan di Ruang Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pengurus menerima pengaduan dari masyarakat
- Pengurus mencatat pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat di buku register pengaduan
- Pengurus menyampaikan ke Unit Pemberi Layanan yang bersangkutan dan Tim Pengaduan untuk mendapatkan tindak lanjut dan klarifikasi

**PENYELESAIAN PENGADUAN ATAU KONFLIK
MASYARAKAT**



RSAUD WONOASAH

No. Dokumen	No. Versi	Halaman
01/666.39/001/2022	Ver. 1	2/2
BPO	Tujuan Terbit: 1. JUN 2022 <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memberikan jawaban kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan b. Pengaduan Secara Tidak Langsung <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat keterangan / media online, kotak surat, whatsupp, email, atau fax 2. Petugas menerima pengaduan dari masyarakat 3. Petugas mencatat pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat di buku register pengaduan 4. Petugas menyampaikan ke Unit Pemberi Layanan yang beranggaman dan Tim Pengaduan untuk mendapatkan simbol tanggut dan klarifikasi 5. Petugas memberikan jawaban kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan 	
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengaduan 2. Bidang 3. Kesi/Pidilag 4. Bagian Tata Usaha 5. Petugas Pengaduan 	



RSUD WONGSARI

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

	No. Dokumen DI/KB/UMUM/V/2022	No. Revisi ke-1	Halaman 1/3
BPO	Tanggal Terbit 20 Februari 2022	Ditetapkan DIREKTUR, <u>dr. HIKMI JULIANTYOWATI, Sp.A.</u> Pembantu Th.I, GoltV/b NIP. 19700206 199903 2 004	
PENGETAHUAN	Pengetahuan Pengaduan Masyarakat adalah proses pengkileuan informasi masukan, narasi dan keluhan dari masyarakat/pengguna layanan rumah sakit terhadap layanan yang disampaikan secara lisan atau tertulis melalui media komunikasi narasi, SMS/WA, telepon dan email sehingga dapat berjalan lancar dengan baik.		
Tujuan	Sebagaimana acuan dalam penetapan fungsi fungsi untuk :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh informasi/masukan, narasi dan keluhan dari masyarakat/pengguna layanan di rumah sakit; 2. Memberikan tujupesan atau informasi/masukan, narasi dan keluhan dari masyarakat/pengguna layanan di rumah sakit; 		
KEBLIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Wongsari Kaligatesir Cireunghasih Nomor DI Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kepuatan Rumah Sakit Umum Daerah Wongsari.		
PROSEDUR	<p>A. Petugas Informasi/Unit Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Informasi/Unit Layanan memberikan pengaduan/informasi/masukan, narasi dan keluhan dari masyarakat pengguna layanan di ruang-ruang unit layanan baik secara lisan/tertulis melalui komunikasi narasi/SMS/WA/email; 2. Petugas Informasi/Unit Layanan memberikan respon/tanggapan/tindaklanjut 		

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT



RSUD WONOSARI

No. Dokumen

01/406 Usaha / Umkm

No. Revisi

-01

Babasmar

2/3

SPO

Tanggal Terbit

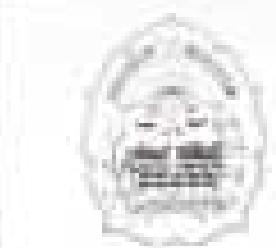
10 Jan 2019

sesuai yang disampaikan langsung oleh pengguna
layanan di unit tersebut

3. Petugas Informasi/Unit Layanan menyampaikannya kepada Tim Pengaduan RSUD Wonosari untuk aduan yang belum terseleksi dan agar ditindaklanjuti.

B. Tim Pengaduan Pengaduan:

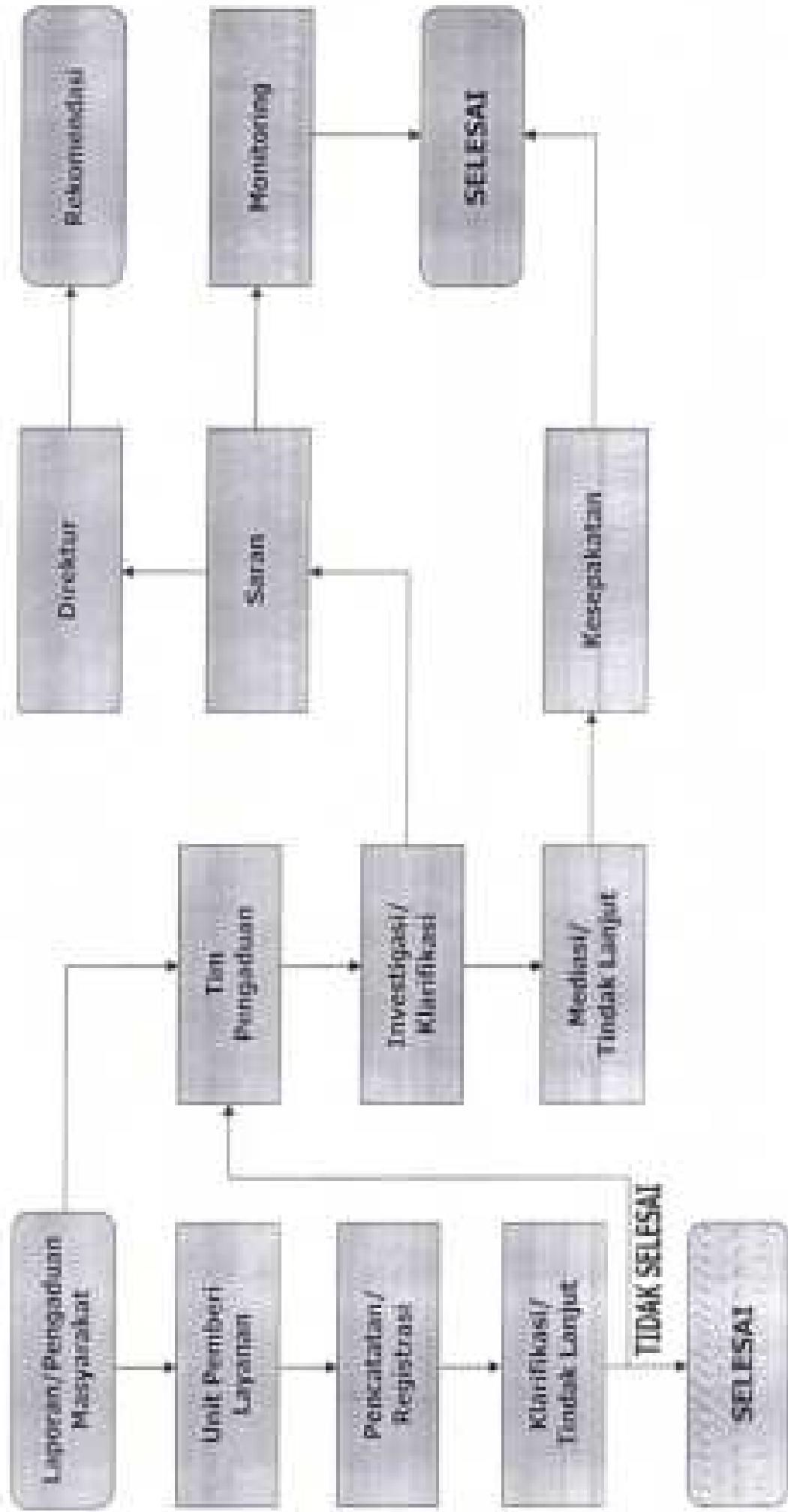
1. Tim Pengaduan Pengaduan menerima Pengaduan/informasi/ masukan, surat dan keluhan dari masyarakat/pengguna layanan rumah sakit yang belum terseleksi dari Penugas penerima aduan atau dari Unit Pelayanan.
2. Tim akan merujuk dalam hal registrasi pengaduan Rumah Sakit.
3. Tim akan memberikan respon/tindak lanjut segera terkait dengan permasalahan yang disampaikan.
4. Jika telah selesai maka dianggap selesai, tetapi jika masih belum selesai maka akan disampaikan kepada unit/ bidang terkait untuk ditindaklanjuti.
5. Apabila masih belum selesai maka akan disampaikan ke Direktur untuk diberikan rekomendasi simpanan lebih lanjut agar dapat terselesaikan.
6. Tim Pengaduan Pengaduan akan melaksanakan tindakan sesuai dengan arahan dari rekomendasi dari Direktur



PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

RSUD WONOSARI	No. Dokumen 01/MS/Umum/2011	Tgl. Survei se 1	Halaman 3/3
BPO	Tanggal Terbit 10 Maret 2011		
<p>1. Apakah sudah terselenggaran meeting dalam pelaksanaan evaluasi dan perbaikan;</p> <p>2. Tim Pengelola Pengaduan membantu rekapitulasi informasi hasil Pengelolahan Pengaduan secara berkala kepada Direktorat:</p>			
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Kehutang/Bagian/Pembudayaan/Bekesi2. Petugas Informasi/ Adjunct3. Tim Pengelola Aksiun		

ALUR PENYELESAIAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT DI RSUD WONOSARI



Raport Aduan di Sumah Sabtu Untuk Dicatat dan Disampaikan Diungkapkan
Bulan Januari 2024

No	Tanggal	Audi Pidana	Hasan Aduman	Tanggapan Komplain	Tindak Lanjut dan Pihak Terkait	Keterangan
1	Januari, 28/01/2024	Hosni Suman	CEO Diklatnas PSD yang bertemu gak berpakaian santai lalu dia	2000/2024 Diklatnas PSD yang bertemu gak berpakaian santai lalu dia	Pelatihan di sela-sela kegiatan bekerja dengan teman dan seorang saudara	Diklatnas PSD yang bertemu gak berpakaian santai lalu dia
2	27/01/2024	Sabtu	Ketua Suman Nur Afif Worcahan	Perbaikan kesadaran bahwa pelatihan yang dilakukan pada hari sebelumnya tidak dapat dilaksanakan	Fasilitasi pelatihan Partisipasi dalam "Diklatnas PSD" Metode di Lapangan	Worcahan



Verifikasi dan Penandatanganan
Hosen Tim Pengaduan
Surat nomor 24/M/WR/H
Tgl 19/01/2027 190003 1 004

Verifikasi dan Penandatanganan
Hosen Tim Pengaduan
Surat nomor 24/M/WR/H
Tgl 19/01/2027 190003 1 004

1	Surat	Tanda	Surat Keputusan	Pada maklumatnya	Ketua Umum Partai	Perintah untuk perbaikan	Jurusan Keadilan
2	Surat	Surat	Surat Keputusan	Pada maklumatnya	Ketua Umum Partai	Perintah untuk perbaikan	Jurusan Keadilan
3	Surat	Surat	Surat Keputusan	Pada maklumatnya	Ketua Umum Partai	Perintah untuk perbaikan	Jurusan Keadilan
4	Surat	Surat	Surat Keputusan	Pada maklumatnya	Ketua Umum Partai	Perintah untuk perbaikan	Jurusan Keadilan

Postgutposten Postverteilung
Gütersloh A 15
Kurierdienst DHL B C



Wissenschaftsministerium NRW
Fachrat für Politikwissenschaft
Prof. Dr. Thomas Schäfer
Schäfer

1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Wm3000_1000_20220224	Wm3000_makai_Wm3000	Wm3000_makai_Wm3000
Diesahr_HSGU_Wm3000	diesahr_wm3000_hsgu	Wm3000_makai_Wm3000
Wm3000_makai_Wm3000	Wm3000_makai_Wm3000	Wm3000_makai_Wm3000
Wm3000_makai_Wm3000	Wm3000_makai_Wm3000	Wm3000_makai_Wm3000
8	Wm3000_1000_20220224	Wm3000_1000_20220224
Kunang		
Sekarwan		
Kesawan		
Tuanas		
Terimahsyah		
Tiara		
mansabtawu		
Tienda		
lalibetan		
Lukibetan		
Rifkina		
Reformasi		
Retno		
Tiwi		
mansabtawu		
Tienda		
lalibetan		
Lukibetan		
Pecatuusah		

2. Melakukan pengembangan lebih besar lagi berpedoman dengan prinsip CS	
3. Masa 14 sampai 2024 tidak berfungsi pada penilaian sebagai kualitas dan mengakibatkan subjektif ketepuhan dan mengakibatkan kesesuaian keputusan tim dengan ketidakan logiknya ketepuhan	
4. Karena memfasilitasi setiap hari kamarnya mandi WA dan mengakibatkan ruang yang tidak tidak selalu dibutuhkan oleh CS	



Wahyudin, S.Kom, M.Pd.
Ketua Tim Pengeluaran
(Signature)
Surabaya, 15 April 2024
NIP. 19670327 199302 1 001

Maßnahmenkategorie	Thema / Fokus	Maßnahmeninhalt	Erfordernisse für die Umsetzung	Beschreibung des Ziels der Maßnahme
Technologien	Kommunikationstechnik	Erstellung eines auf dem Markt verfügbaren Stellwagens, der mit einer elektrischen Antriebsanlage und einem speziellen Ladegerät ausgestattet ist.	Entwickelt werden müssen neue Herstellungsprozesse, um die Kosten effizient zu senken.	Stellwagen zur Nutzung auf der Straße
Technologien	Rohstoffversorgung	Entwicklung eines elektrischen Antriebs für den Betrieb von Pkws, die auf Basis von erneuerbaren Energien betrieben werden.	Entwickeln müssen Fahrzeuge mit einer höheren Kapazität der Akkus, um die Reichweite zu erhöhen.	Autos, die überwiegend auf elektrischem Antrieb verkehren
Technologien	Produktionstechniken	Entwicklung von Prozessketten, die die Produktion von elektrischen Antrieben für Pkws ermöglichen.	Entwickeln müssen Produktionsanlagen, die die Anforderungen an die Produktion von elektrischen Antrieben erfüllen.	Produktion von elektrischen Antrieben für Pkws
Technologien	Verarbeitungstechniken	Entwicklung von Prozessketten, die die Produktion von elektrischen Antrieben für Pkws ermöglichen.	Entwickeln müssen Produktionsanlagen, die die Anforderungen an die Produktion von elektrischen Antrieben erfüllen.	Produktion von elektrischen Antrieben für Pkws

HSI/ALLOVY/DS/50	Wingborg, Hildegunn, Ingvar	Frandsen, Birthe	1. Dansk politiker, medlem af Folketinget 2. medlem af Folketinget 3. medlem af Folketinget
It was in 1973 that Poul Sørensen became Prime Minister.	Poul Sørensen was born in 1920 in Odense, Denmark. He studied law at the University of Copenhagen and graduated in 1945. After working as a legal assistant at the Ministry of Justice, he became a member of the Social Democratic Party in 1946. In 1951, he was elected to the Folketing for the first time, representing the constituency of Vestsjælland. He served as Minister of Justice from 1957 to 1962 under prime minister Ove Krarup. From 1962 to 1966, he was Minister of Finance under prime minister Laurits Faber. In 1966, he became Minister of Education under prime minister Kaj Munk. He served as Minister of Justice again from 1970 to 1972 under prime minister Poul Hartmann. In 1973, he succeeded Poul Hartmann as Prime Minister.	He was born in 1920 in Odense, Denmark. He studied law at the University of Copenhagen and graduated in 1945. After working as a legal assistant at the Ministry of Justice, he became a member of the Social Democratic Party in 1946. In 1951, he was elected to the Folketing for the first time, representing the constituency of Vestsjælland. He served as Minister of Justice from 1957 to 1962 under prime minister Ove Krarup. From 1962 to 1966, he was Minister of Finance under prime minister Laurits Faber. In 1966, he became Minister of Education under prime minister Kaj Munk. He served as Minister of Justice again from 1970 to 1972 under prime minister Poul Hartmann. In 1973, he succeeded Poul Hartmann as Prime Minister.	It was in 1973 that Poul Sørensen became Prime Minister.

Introduzione

Per questo libro ho scelto di parlare

di un argomento che mi è molto caro:

il rapporto tra le donne e la politica.

Ci sono molti libri su questo tema,

ma pochi fanno una riflessione

che sia così profonda e completa.

Ecco perché ho deciso di scrivere

questo libro su questo argomento.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Il libro è stato scritto per tutti coloro

che sono interessati alla storia

e alla politica delle donne.

Principali temi trattati

Il libro tratta di diversi temi:

la storia delle donne, la politica,

il rapporto tra le donne e la politica,

il rapporto tra le donne e la società,

il rapporto tra le donne e la famiglia,

il rapporto tra le donne e la cultura,

il rapporto tra le donne e la religione,

il rapporto tra le donne e la politica,

Sicherheitstechnische Anforderungen	
• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.	• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.
• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.	• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.
• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.	• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.
• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.	• Sicherheitsmaßnahmen müssen die Anforderungen des § 12 Absatz 1 der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.

卷之三

POLYTHIOPHOSPHATE 113

卷之三

Evaluating digital health programs

卷之三

münthe eunih dan heim

प्राचीन भारतीय

卷之三

Urban planning better

卷之三

WILHELM HEINZ

卷之三

卷之三

卷之三

WATER USE

卷之三

1100

THEORY AND PRACTICE

Tributary load budget

卷之三

卷之三

Dissertationen

Jurnal Pendidikan

INTERVIEW WITH DR. BURTON

Ergonomics

l'ultimo del Lutero	l'autore	Spagna e Portogallo, Italia	Alfonso d'Aragona, Duca di Calabria	un messaggio nascosto nell'addestramento dei bambini	l'educazione (il) di Godofredo	per le persone, la vita quotidiana	scopre, ha un posto nella storia	Dante, un poeta, un filosofo	ritrovare il suo luogo natale	che è soprattutto di Hesiodo, ma anche di Ovidio	Trasmettere l'identità europea, ma anche mondiale	riden posse, Kofi Annan
---------------------	----------	-----------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	---	-------------------------

Bkt. dan medis IJGPA
mengalihpindahkan berisi
berikan jatah - hia - kta - sepa
gila pengaruh Diklat di Diklat
sehingga manusia mengalihpindah
anaknya turun turun
seper hari atau Doctor

Universitas TDK-Saintek PGRI
pembentukan komunitas masyarakat
dalam lingkungan Diklat di Diklat
bagaimana dengan manusia dan teknologi
diklat di Diklat - dikesukianya manusia
diklat di Diklat Gunung Madai - teknologi
pembentukan komunitas masyarakat
manusia dan teknologi

Saran saran teknologi pesud
di Rumah sakit Nipah
pembentukan komunitas masyarakat
manusia dan teknologi

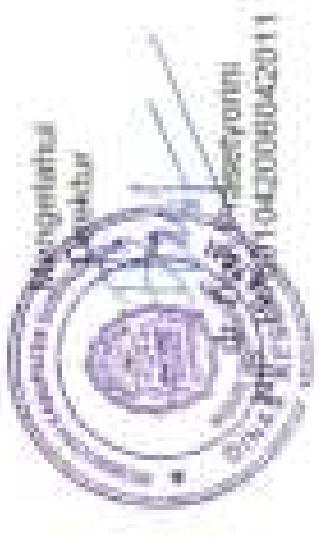


NIP. 19670227 199401 001
Surat tanda Masa
Ketua Tim Pengabdian

Ghisl

Via Agus
Tahun 2024

No.	Name	Subject	Date	Time
1	Sabu, Ammu	662469551 Addition and subtraction	24/08/2024	11:00 AM - 12:00 PM
2	Kamala, Parvathi	662469551 Addition and subtraction	24/08/2024	11:00 AM - 12:00 PM
3	Sharmila, Meena	662469551 Addition and subtraction	24/08/2024	11:00 AM - 12:00 PM



http://hdl.handle.net/1902.1/20001
Sawyer, Sam M.
John T. in Pragdaem
Received in May 2011

Gut

Titolo	Cognome e Nome	Nome e Cognome del Responsabile	Indirizzo		Capo Dipartimento	Dipartimento	Settore	Funzione	Ruolo	Nazione	Residenza	Data di nascita	Cittadinanza	Nazionalità	Grau-	Cittadino	Prestazioni	Osservazioni
			Numero	Via														
1	Santoro, Giacomo	Neri, Barbara	Materiale	Via dei Mille, 100	Ricciardi, Giorgio	Scienze Sociali	Politica	Analista	Analista	Italia	Bari	25/01/1965	Italiano	Italiano	Accad.	Cittadino	Analista	Analista

Mohon dibantu perjasaannya	<p>pengadaan dan ditemui dengan baik.</p> <p>Responduku =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi disarankan secara langsung dan teknologi dan klinik untuk menghindari resiko kecakalan dan notifikasi 2. Pendidikan perawat atau edukasi perawat atau dokter dalam hal klasifikasi penyakit dan resiko penyakit pada pasien khususnya pasien diabetes 3. Jelaskan tentang seromin yang yang mencuci dan cuci yang dibebaskan 4. Jika memungkinkan si pasien dokter Sp. Bed diambilah



Wornamejakan 2224
Rabu Tim Pengabdian
Chairul
Sarantara SK&I ID MI
NIP. 119570297 11023 1 004

Bantuan Addam di Rumah Sari Untuk Wujudkan Generasi Terbaik
Bulan Juli 2022

No.	Tanggal	Nama Jadi	Nama Pendek	Kegunaan	Maksud Pakai	Tujuan	Kelengkapan	Pendapat	Kata Kunci	Penyampaian	Keterangan
1.	06/07/2022	Qusayyira	Qusay	Rambut	Pakai bantuan bulanan	Penyambutan di pernikahan	Lampu hias, dekorasi, tali dan tisu	Dekorasi ruang tamu	dekorasi	Ungkapkan rasa terima kasih	Bantuan diberikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi
2.	06/07/2022	Suzani Syahidah	Suzani	Rambut	Pakai bantuan bulanan	Penyambutan di pernikahan	Lampu hias, dekorasi, tali dan tisu	Dekorasi ruang tamu	dekorasi	Ungkapkan rasa terima kasih	Bantuan diberikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi
3.	06/07/2022	Yusuf dan Khadija	Yusuf dan Khadija	Rambut	Pakai bantuan bulanan	Penyambutan di pernikahan	Lampu hias, dekorasi, tali dan tisu	Dekorasi ruang tamu	dekorasi	Ungkapkan rasa terima kasih	Bantuan diberikan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi

			Witnesse: Mr. A.M.C. Loh Date: 28/03/2022
Item	Serial number of property	Date of sale or gift	Details of property
1	280975024	28/03/2022	Land situated at Plot No. G-32 of Sector 100A, Phase 1B, Mohali (Punjab). Land area 1900 sq.yds.
2	280975025	28/03/2022	Land situated at Plot No. G-32 of Sector 100A, Phase 1B, Mohali (Punjab). Land area 2400 sq.yds.
3	280975026	28/03/2022	Land situated at Plot No. G-32 of Sector 100A, Phase 1B, Mohali (Punjab). Land area 1200 sq.yds.

pred pred M heterogeneus
metamorphosed sandstone

drilled sandstone, sandstone
in sandstone

2024, deep well USGS in T. J. Hill

litho-metamorphic rocks
metamorphic rocks, pelitic

Dby A dolomitic Dp? Dsp
dolomitic rocks, dolomitic

metamorphic rocks, metasediments
metamorphic rocks, pelitic

metamorphic rocks, pelitic
metamorphic rocks, pelitic

Maatschappij dat belanghebbende
partijen en andere belanghebbende
partijen van deelname houdt
vast dat deelname aan de verkiezingen
niet mogelijk is.

Wetgeving kan niet worden
toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk
is.

Wetgeving kan niet worden
toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk
is.

Wetgeving kan niet worden
toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk
is.

Wetgeving kan niet worden
toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk
is.

Wetgeving kan niet worden
toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

wordt toegelaten omdat deelname
aan de verkiezingen niet mogelijk

and when local people
have developed their own

ACKNOWLEDGEMENTS

We thank our colleagues at the
University of Bristol, and the
Joint Research Centre in Ispra, Italy,
who have contributed to this work.

We also thank the referees for
their useful comments and suggestions.

Financial support was provided by

the European Commission's
Marine Environment Monitoring
Programme, the UK Environment
Agency, the Natural Environment
Research Council, the Royal Society
for the Protection of Birds, and the
Welsh Assembly Government.

Special thanks are due to Mark

McLaren, who helped to develop
the model, and to John
Reid, of the University of Bristol,
for his support throughout the work.

Finally, we thank all the
participants in the fieldwork

and laboratory work, particularly
those from the University of Bristol,
the Joint Research Centre in Ispra,
and the National Oceanic and
Atmospheric Administration, USA.

Thanks are also due to
the members of the public
who participated in the surveys.

REFERENCES

Bailey, R. M., 1990. The
biogeography of British
molluscs. In: J. C. H. Clark
(ed.), *Biogeography of British
Molluscs*. Academic Press, London.

Bailey, R. M., 1991. The
biogeography of British
molluscs. In: J. C. H. Clark
(ed.), *Biogeography of British
Molluscs*. Academic Press, London.

Bailey, R. M., 1992. The
biogeography of British
molluscs. In: J. C. H. Clark
(ed.), *Biogeography of British
Molluscs*. Academic Press, London.

hoch und niedrig sind

ausführliche Erklärungen

deren Verwendung

zur Zeit der Arbeit

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

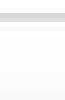
noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

oder mit dem Projekt

noch keine Erfahrungen

mit dem Projekt gemacht

• <i>Penne</i> (penne) 	• <i>Spaghetti</i> 	• <i>Fusilli</i> 	• <i>Rigatoni</i> 	• <i>Cannelloni</i> 
• <i>Farfalle</i> 	• <i>Conchiglie</i> 	• <i>Anguria</i> 	• <i>Capunsei</i> 	• <i>Farfalle</i> 
• <i>Linguine</i> 	• <i>Spirelli</i> 	• <i>Farfalle</i> 	• <i>Spaghetti</i> 	• <i>Farfalle</i>
• <i>Farfalle</i>	• <i>Spaghetti</i>	• <i>Farfalle</i>	• <i>Spaghetti</i>	• <i>Farfalle</i>



State of Wisconsin
Department of Motor Vehicles

THE STATE OF WISCONSIN

Gill

Karen Tim Penderman
Wisconsin DNR

Power of attorney issued today

Issued on the 20th day of

December 2010



Surat Tanda Terima
nr. 1000212159001 001
Ketua Tim Pengadaan

Gul

Tanggal / Surat Tanda Terima
Ditulis pada: 2024

1	Surauah Kepala Bidang	07202004 Menerima Pendaftaran Perbaikan	Waktu Administrasi Selama 30 hari	Jenis Kerjasama Jaringan
2	Surauah Kepala Bidang Kependidikan	07202004 Lampirannya Berdasarkan Surauah Kepala Bidang Kependidikan	Waktu Administrasi Selama 10 hari	Jenis Kerjasama Jaringan

Bulan Agustus 2024
Bulan Agustus 2024

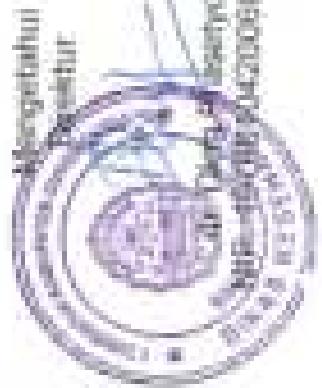
Pembela Kakanan & Rumbuh Satu Untuk Dikiran Mahasiswa dan Santriwan

Surat Tanda Terima
nr. 1000212159001 001
Ketua Tim Pengadaan

W	DIS Gesamtzeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion
E	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion
G	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion
I	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion
L	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion
M	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion	DIS Produktionszeitraum Hersteller Wirkzeitpunkt im Projekt der Produktion

Rechte Seite von der Platte mit dem Dauerstrich Wirkzeitpunkt Kundenanforderung sind
Basis für Spalte 2 des Berichtsbergs

pendafuan, suatu tanda
dan kasele tokoh atau
dokter



Wenceslao September 2014
Katus Tim Pengesahan

Suruhanjaya Syariah
NIP 195702198001001
001

Hilfeleistung, bestellt zu schmieden durch Pferdegespann Reitwagen, J. Döring	Leinen aus Pferdehaar ausgesäubert und gewaschen Gedrehter (Geflochtener) Haarschädel	Stroh oder Strohheuer für die Tiere Sattelunterlage für die Tiere (1)	Wiederholung Futterkasten Futterkasten mit Riegel Futterkasten mit Riegel (mit 2 Ebenen)
Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm	Leinen aus Pferdehaar ausgesäubert und gewaschen Gedrehter (Geflochtener) Haarschädel	Stroh oder Strohheuer für die Tiere Sattelunterlage für die Tiere (1)	Wiederholung Futterkasten Futterkasten mit Riegel Futterkasten mit Riegel (mit 2 Ebenen)
Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm	Leinen aus Pferdehaar ausgesäubert und gewaschen Gedrehter (Geflochtener) Haarschädel	Stroh oder Strohheuer für die Tiere Sattelunterlage für die Tiere (1)	Wiederholung Futterkasten Futterkasten mit Riegel Futterkasten mit Riegel (mit 2 Ebenen)
Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm Futterkasten für Pferde, mit 2 Ebenen, 150 cm	Leinen aus Pferdehaar ausgesäubert und gewaschen Gedrehter (Geflochtener) Haarschädel	Stroh oder Strohheuer für die Tiere Sattelunterlage für die Tiere (1)	Wiederholung Futterkasten Futterkasten mit Riegel Futterkasten mit Riegel (mit 2 Ebenen)

HIP 1987/1271, BAND 1, 001
Sekretariat SMW M 507

Günt

Rechtsrat Oskar von Zedtwitz
Weisses Kreuz Hospital 2024



Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter
Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter
Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter
Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter
Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter	Rechtsanwalt Günter

Petaan Pendirian di Rumah Sakti Umaru Wonoasari Kebutesan Gunungkidul
Bulan November 2024

No	Tanggal	Ayah Adiliani	Watali Juharani	Tindak Lanjut dan Perbaikan	Kompetensi	Penulis	Peneranganan	Dr. Wahyu	Guna
1	01/11/2024	NG Ressi Dwi Wonoasari Drs Hadiin Aristo	Topeng dan taliengan menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sebutan sendiri. Kain dan bahan lainnya bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	NG Ressi Dwi Wonoasari sebagian besar bahan dapat dipakai untuk dibuat topeng dan taliengan	peternakan, Pengolahan dan pengembangan sumber daya alam	DR. Wahyu	Diketahui bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	Agar hasilnya baik	Bukti bukti bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.
2	01/11/2024	NG Ressi Dwi Wonoasari Drs Hadiin Aristo	Setiap hari selama 10 hari sebutan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	Setiap hari selama 10 hari sebutan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	peternakan, Pengolahan dan pengembangan sumber daya alam	DR. Wahyu	Diketahui bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	Don Jam beraksara?	Bukti bukti bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.
3	01/11/2024	NG Ressi Dwi Wonoasari Drs Hadiin Aristo	Setiap hari selama 10 hari sebutan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	Setiap hari selama 10 hari sebutan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	peternakan, Pengolahan dan pengembangan sumber daya alam	DR. Wahyu	Diketahui bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.	Sekarang mungkin tidak bisa	Bukti bukti bahwa menggunakan teknologi cetak 3D pada pakaian sendiri. Kain dan bahan bahan bahan teknologi dapat dipakai untuk pembuatan topeng dan taliengan.

meist mindernde Menge

Stellen die keinen Preis dar

Preis der darüber liegenden Menge

Die über welche Waren kann
keine Preise bestimmen k

drei Lizenzen für eine

zwei Preise York Law

Während der gesamten Zeit			
Rechtschreibfehler	Rechtschreibfehler	Rechtschreibfehler	Rechtschreibfehler
Platz wird im weiteren Text nicht weiter benannt und darüber hinaus keine weitere Erwähnung der Platte vorgenommen	Platz wird im weiteren Text nicht weiter benannt und darüber hinaus keine weitere Erwähnung der Platte vorgenommen	Platz wird im weiteren Text nicht weiter benannt und darüber hinaus keine weitere Erwähnung der Platte vorgenommen	Platz wird im weiteren Text nicht weiter benannt und darüber hinaus keine weitere Erwähnung der Platte vorgenommen
Während der gesamten Zeit			

Während der gesamten Zeit			
Während der gesamten Zeit			
Während der gesamten Zeit			
Während der gesamten Zeit			
Während der gesamten Zeit			

	8	Patient	Gest-Hildegard	Kinder- und Jugendärzte	Hausarzt		
7	2	Röntgen	Hand	Orthopädie			
8	001877333077	Gelenk III	Fingerring III	Hausarzt			
9							
10							

5	Batasan	Rencana Sistem	091220057575
	Congregasi catolik di Indonesia	Jl. Jenderal Sudirman 27711 130024	Surat perintah dan surat tanda kuasa
	Pembentukan kantor di daerah	Surat diterima pada tanggal 20/04/2014	Wakil ketua pengeluaran
	Perbaikan dan pembangunan	Surat diterima pada tanggal 20/04/2014	Wakil ketua pengeluaran
	Perbaikan dan pembangunan	Surat diterima pada tanggal 20/04/2014	Wakil ketua pengeluaran
	Pembentukan kantor di daerah	Surat diterima pada tanggal 20/04/2014	Wakil ketua pengeluaran
	Pembentukan kantor di daerah	Surat diterima pada tanggal 20/04/2014	Wakil ketua pengeluaran



Wakil Ketua Tim Pengeluaran
Wakil Ketua Tim Pengeluaran

NIP 19670227 1993 1 001
Somarsono ST MM MM
Guntur

Surat perintah dan surat tanda kuasa

NIP 19670227 1993 1 001
Somarsono ST MM MM

Surat perintah dan surat tanda kuasa

Guntur

Rakip Aduan di Rumah Sakit Umum Daerah Wijenawati Kebutuhan Gunungkidul
Bulan Desember 2024

No	Tanggal	Jenis Aduan	Materi Aduan	Tujuan	Tujuan Lainnya	Waktu	Keterangan
1	12/12/2024						



Wijenawati Desember 2024
Kebut Tira Pengobatan

Semarang, 27 Desember 2024
NIP 19670327 199901 1 001